

TAJUK RENCANA

Yogya Menuju Endemi Covid-19

KASUS Covid-19 yang terjadi di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang relatif baik, jumlahnya terus menurun, angka kesembuhan meningkat dan angka kematian nol. Ini tentu memberi harapan atau optimisme bahwa Kota Yogya segera memasuki fase endemi. Namun untuk sampai ke titik tersebut tentu harus dipenuhi persyaratan yang cukup ketat, mulai dari indikator tingkat infeksi, positive rate di bawah 5 persen, risiko wabah diminimalkan, pelayanan kesehatan yang memadai hingga partisipasi masyarakat (KR 1/11).

Kita sangat yakin bila masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kesehatan dan menerapkan prokes secara ketat, Yogya bakal memasuki masa endemi. Artinya, kita bakal hidup berdampingan dengan Covid-19, namun tidak ada kekhawatiran untuk tertular, karena budaya hidup sehat telah tertanam di masyarakat. Setidaknya, masyarakat akan merasa tenang ketika melakukan enam aktivitas utama, yaitu perdagangan, perjalanan, wisata, ekonomi produktif, keagamaan dan pendidikan.

Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan keliru soal fase ke arah endemi ini, dikiranya Covid-19 sudah sirna, sehingga semua aktivitas dapat dijalankan tanpa pembatasan. Bahkan, orang sudah bebas untuk tidak mengenakan masker. Di sejumlah negara, terutama Eropa, memang ada yang melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Pemakaian masker hanya diberlakukan di tempat-tempat tertentu yang dirasa rawan penularan. Sedangkan di jalan-jalan sudah diperbolehkan untuk melepas masker.

Namun, kini kondisi sudah berubah, apalagi, seperti di Inggris muncul varian baru yang merupakan turunan Delta, yakni AY.4.2. Varian baru ini penularannya lebih cepat dibanding varian Delta dan efeknya juga lebih kuat. Kita sangat berharap varian baru ini tidak masuk ke

Indonesia. Untuk itulah pemerintah menerapkan aturan ketat terkait perjalanan orang dari dan ke luar negeri, jangan sampai membawa virus yang membahayakan. Kita tak boleh lagi kecolongan.

Satgas Penanganan Covid-19 juga sudah mengingatkan masyarakat tentang ancaman bahaya gelombang ketiga seperti terjadi di beberapa negara. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memangkas libur cuti akhir tahun, dengan tujuan agar tidak terjadi kerumunan orang. Ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Tapi kalau kita cermati, khususnya di Kota Yogya, mobilitas masyarakat sudah normal, bahkan kecenderungannya meningkat, di beberapa titik terjadi kemacetan. Sementara okupansi hotel juga meningkat seiring tingginya tingkat kunjungan wisatawan. Inilah yang diharapkan pelaku usaha restoran dan pariwisata. Ekonomi menggeliat setelah beberapa waktu sekarang. Ini fenomena yang wajar, namun tetap harus disikapi secara hati-hati.

Skrining melalui aplikasi PeduliLindungi menjadi instrumen yang cukup efektif untuk mendeteksi bercokolnya virus. Bahkan, jejak perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain bisa terlacak melalui aplikasi ini. Sayangnya, belum semua area publik menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Inilah yang harus kita dorong agar aplikasi ada di setiap area publik.

Memang ini bukan jaminan untuk mengusir Covid-19, namun setidaknya menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk melakukan deteksi dini. Dengan pengawasan yang ketat terhadap penerapan prokes, kita yakin Yogya segera memasuki fase endemi dan kita bakal hidup berdampingan dengan Covid-19 tanpa rasa khawatir tertular. □

Melihat Kembali Persoalan Pertanahan

Fahmi Amhar

Kadang juga ada unsur angkatan bersenjata sebagai penopang kekuasaan di beberapa negeri (Bradley R. Simpson, 2010, *Economists with Guns*)

Masalah berikutnya adalah alih fungsi, terutama lahan pertanian, meski telah ada UU No. 41 / 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Banyak faktor penyebabnya. Pertama faktor eksternal, yaitu dinamika pertumbuhan perkotaan, de-

seorang sudah memiliki tanah, tetapi ditelantarkan bertahun-tahun karena itu objek 'investasi' atau 'spekulasi'. Menurut Pasal 34 UU Pokok Agraria, Hak Guna Usaha dapat dihapus bila tanah ditelantarkan, namun ini amat jarang terjadi selama Pajak Bumi dan Bangunannya dibayar lancar. Kalau dalam hukum Islam, tanah yang ditelantarkan 3 tahun wajib disita negara, dan negara dapat memberikannya kepada yang mampu mengelolanya.

6 Cara

Menurut Abdurrahman al-Maliki (1963), tanah itu dapat dimiliki individu melalui 6 cara. Tiga yang pertama sama dengan barang biasa, yakni jual-beli, waris, dan hibah. Tiga berikutnya spesifik tanah, yaitu *ihya'ul mawat* (menghidupkan tanah mati, semisal menghidupkan lahan kritis); *tahjir* (memberi batas di sekeliling tanah negara untuk selanjutnya dikelola); dan *iqtha'* (pemberian negara seperti dulu lahan transmigrasi). Persoalannya, proses ini tetap wajib diatur dan diadministrasi agar tidak menjadi objek sengketa.

Sekarang ada sebagian transmigran sejak zaman Orde Baru, tiba-tiba terusir karena tanahnya disertipikatkan HGU oleh korporasi. Transmigran itu tidak pernah pegang sertipikat. □

** Prof Dr Ing Fahmi Amhar, Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial, Anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)*



KR-JOKO SANTOSO

Menurut Ir Virgo Eresta (Ketua Ikatan Surveyor Indonesia), dari sekitar 128 juta bidang tanah, baru 78 juta yang telah bersertipikat, dan yang statusnya *clear* (teknis) dan *clean* (yudis) baru 38,5 juta (30%). Dan menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 71% tanah di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan. Selain itu, 23% tanah (di luar hutan) sudah dikuasai oleh korporasi besar (<https://tirto.id/kpa-71-tanah-di-Indonesia-dikuasai-korporasi-kehutanan-cxlr>). Barulah sisanya dimiliki masyarakat. Menurut KPA, rata-rata kepemilikan tanah oleh petani kurang dari 0,5 hektare per petani. Di sisi lain, ada satu korporasi yang menguasai tanah hingga 600 ribu hektare.

Legalitas

Semua ini terjadi tentu karena ada legalitas oleh kekuasaan. Hubungan erat korporasi dengan kekuasaan ini disebut korporatokrasi (John Perkins, 2004, *Confessions of Economic Hitman*) yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh beberapa korporasi besar. Mereka dapat membeli kebijakan pemerintahan untuk mewujudkan ambisi bisnisnya. Mereka biasa juga disebut oligarki.

mografi maupun ekonomi. Kedua faktor internal, yaitu kondisi sosial-ekonomi rumah tangga petani, semisal dia menjual tanahnya untuk biaya kuliah anak, naik haji, atau berobat. Dan ketiga faktor regulasi pemerintah, terkait perubahan tata ruang. Dalam rezim korporatokrasi, bisa diduga faktor terbesar alih fungsi tanah adalah faktor regulasi. Jadi, seolah-olah ada kebijakan dari pemerintah, padahal di balik layar sesungguhnya para korporasi besarlah yang 'membeli' kebijakan itu.

Yang menjadi persoalan berikutnya di lapangan, adalah gap antara kepemilikan dan produktivitas. Terkadang se-

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Hari Orang Kudus dan Hari Arwah

Ag Budi Susanto

UMAT Katolik setiap tahun selalu memperingati hari orang kudus dan dilanjutkan dengan hari arwah. Gereja Katolik merayakan hari para orang kudus, baik mereka yang telah dikanonisasi/diakui gereja sebagai Santo/Santa, maupun para orang kudus lainnya yang tidak/belum dikenal. Peringatan ini dilaksanakan setiap 2 November.

Pada awalnya kalender Santo/Santa dan Martir berbeda dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Dan gereja-gereja lokal menghormati orang-orang kudus dari daerahnya sendiri. Namun kemudian hari perayaan menjadi lebih universal. Referensi pertama untuk merayakan hari para orang kudus terjadi pada St Efreim dari Syria. St Yohanes Krisostomus (407) menetapkan hari perayaannya yaitu Minggu pertama setelah Pentakosta, yang masih diterapkan gereja-gereja Timur sampai sekarang. Gereja Barat, juga kemungkinan pada awalnya merayakan demikian, namun kemudian menggeserkan tanggal 13 Mei, ketika Paus Bonifasius IV mengkonsekrasikan Pantheon di Roma kepada Santa Perawan Maria dan para martir tahun 610. Perayaan hari para orang kudus pada 1 November sekarang ini kemungkinan ditetapkan sejak zaman Paus Gregorius III (741) dan pertama kali dirayakan di Jerman.

Mempersembahkan Doa

Sehari setelah hari perayaan orang kudus disebut sebagai hari arwah (*all souls day*) yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Mengingat makna antara keduanya demikian dekat, tak mengherankan gereja merayakannya secara berurutan. Setelah merayakan hari para orang kudus, mendoakan para saudara yang telah mendahului kita, dengan harapan

agar mereka dapat bergabung dengan para orang kudus di surga. Perayaan hari arwah menjadi peringatan universal, di bawah pengaruh Rahib Odilo dari Cluny tahun 998. Ia menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah ordo Beneditin 2 November. Kemudian menyebar ke kalangan Biara Carthusian. Sekarang Gereja Katolik merayakannya 2 November, seperti juga Gereja Anglikan dan sebagian Gereja Lutheran.

Dari keterangan di atas, tidak disebutkan mengapa dipilih November dan bukan bulan lain. Namun jika kita melihat kalender liturgi gereja, kita mengetahui bahwa November merupakan akhir tahun liturgi, sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru pada masa Adven sebelum merayakan Natal (Kelahiran Kristus). Maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan sementara di dunia.

Memperingati hari arwah di Indonesia dengan tradisi mengirim doa para leluhur dengan *nyekar* mengirim bunga tabur di pusran para leluhur kita. Sebelumnya bunga tabur dimintakan berkat romo dalam misa arwah di gereja. Ada sebagian mereka mengadakan doa bersama dipemakaman selanjutnya mengirim bunga tabur di leluhur masing-masing.

Ruwahan

Tradisi mendoakan arwah dilakukan saudara-saudara kita di Bulan Sya'ban atau orang Jawa menyebutnya Ruwah. Pada bulan ini ada tradisi yang *diuri-uri*

kelestariaannya sampai sekarang dan masih dijalankan terutama di daerah pinggir atau pedesaan. Orang mengenalnya sebagai tradisi Ruwahan atau Arwahan yaitu tradisi yang berkaitan dengan pengiriman arwah orang-orang yang telah meninggal dengan cara didoakan bersama dengan mengundang tetangga kanan kiri yang pulang mereka diberi 'berkat' sebagai simbol rasa terima kasih.

Hari arwah bagi umat Katolik dan Bulan Ruwah bagi umat Islam memiliki persamaan untuk menghormati dan mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Cara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama untuk mendoakan saudara yang telah tiada. Marilah kita selalu mendekati diri kepadaNya dan selalu mendoakan saudara-saudara kita yang telah tiada. □

** Ag. Budi Susanto SPd, Guru SMP Pangudi Luhur Sedayu*

Pojok KR

BMKG ingatkan potensi cuaca ekstrem.

-- Masyarakat tak boleh lengah.

Aturan dilonggarkan, pelanggaran prokes meningkat.

-- Harus ada aturan pemaksa agar taat.

Banyak kekerasan seksual terjadi di kampus.

-- Butuh keberanian melapor.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pembelajaran Tatap Muka Berkualitas

SEIRING menurunnya level penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Daerah sudah mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi secara bertahap telah memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk DIY, mulai 20 September 2021, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melaksanakan uji percontohan pembelajaran tatap muka terbatas pada 195 sekolah jenjang SMA dan SMK serta 5 sekolah jenjang SLB.

Salah satu alasan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka adalah untuk mencegah *learning loss*, yaitu hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Di masa pandemi, *learning loss* terjadi karena siswa belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dalam jaringan (*daring*) dan di luar jaringan (*luring*).

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga mendapat perhatian khusus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Ada sepuluh pandangan dari IDAI yang ditujukan kepada pemerintah, orang tua, dan siswa agar kegiatan tatap muka berjalan aman. Salah satu pandangannya adalah pembelajaran tatap muka agar dimulai secara bertahap dan tetap harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Besarnya perhatian dari berbagai pihak menunjukkan harapan yang besar terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Karena selain aspek prestasi akademik sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran, aspek keselamatan siswa dan guru juga menjadi fokus utama, sehingga sampai nanti pada waktu kegiatan pembelajaran dilakukan secara normal guru dan siswa tetap terjaga kesehatannya, dan berhasil meningkatkan prestasi

belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka terbatas perlu perhatian khusus dari sekolah dan guru. Pembatasan durasi waktu tatap muka, pembatasan interaksi pembelajaran dan pembatasan jumlah siswa yang hadir menjadi pembeda antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan tatap muka normal. Pada kondisi seperti ini diperlukan strategi khusus dari sekolah dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Untuk mencapai hasil pembelajaran maksimal, guru sebaiknya menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan seksama. Dengan mempertimbangkan kondisi siswa, ketersediaan waktu dan muatan kurikulum yang ada, guru dapat memilih materi belajar esensial atau materi sulit yang akan diajarkan dalam kelas tatap muka.

Karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas masih mengombinasikan pembelajaran online dan tatap muka (*blended learning*), maka guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dan melaksanakan pretest sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sehingga saat masuk ke ruang kelas siswa sudah memiliki bekal permasalahan serta pertanyaan yang akan disampaikan dalam pembelajaran tatap muka. Di sisi lain melalui analisis hasil pretest, guru dapat memperkirakan materi yang masih perlu dibahas dalam pembelajaran tatap muka.

Dengan demikian meskipun dilakukan secara terbatas, pembelajaran tatap muka tetap berkualitas. Guru selalu kreatif, inovatif, inspiratif dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Siswa mengikuti pembelajaran dengan antusias, bersemangat untuk meningkatkan prestasi serta mengembangkan potensi diri meskipun di masa pandemi. □

** Suharyadi, Guru Fisika di SMAN 1 Godean.*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisar Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSC. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percepatan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarish, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk2@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%